BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang menghimpit bangsa Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah masalah kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan di negeri ini dapat lebih efektif dengan memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi lebih produktif. Kemandirian ekonomi perempuan pada suatu negara akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebahagian pada negara tersebut.

Meningkatkan kemandirian perempuan dalam pembangunan akan menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat fisik dan cerdas agar budaya kemiskinan dari suatu keluarga tidak berlanjut. Hal ini mengutip teori dari Oscar Lewis tentang budaya kemiskinan itu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Ini artinya jika kemisikinan masih menyelimuti kelompok perempuan maka jangka panjangnya dapat melembagakan kemisikinan. Maka peran perempuan dalam pembangunan yang mendasar adalah mempersiapkan anak bangsa yang sehat, cerdas, dan terampil. Peran itu tak mungkin dapat dicapai jika mental perempuannya hanya pasrah terhadap kemiskinan. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa

¹ Lukman Soetrisno, *Kemiisinan Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm 90

perempuan sangat penting untuk dikembangkan potensinya dimanapun mereka tinggal.

Peran perempuan yang selama ini hanya memainkan fungsi reproduksi dengan lingkup tanggungjawab mengurus rumah tangga semata, kini bergeser ke arah peran yang lebih produktif. Perempuan di era modern harus mampu membangun kedaulatan ekonominya sendiri. Banyak sekali sektor yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk membangun kemandirian ekonominya. Salah satunya misalnya melalui industri rumahan (home industry), seperti bisnis kerajinan tangan, menjahit pakaian, bisnis makanan, catering, bisnis kue-kue, membangun kelompok usaha bersama, atau menjajaki kemungkinan pekerjaan di sektor informal lainnya.

Usaha mikro yang dikelola perempuan tersebut disadari atau tidak akan berdampak pada ketahanan dan kemajuan ekonomi sebuah negara. Ini terbukti bahwa usaha mikro mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 1997, juga krisis keuangan global 2008 yang juga berdampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia. Tentu amat disayangkan, jika melihat potensi dan kuantitas perempuan yang begitu besar namun tidak diberdayakan menjadi tenaga produktif. Perempuan produktif merupakan istilah yang dilekatkan pada perempuan yang telah mampu memberi kontribusi secara ekonomi baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun negara.

Upaya pengembangan keberdayaan masyarakat lewat pembangunan menurut Parsudi Suparlan yaitu upaya yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah, badan-badan, lembaga-lembaga internasional, nasional, maupun lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara hidup atau kebudayaan suatu masyarakat agar lebih baik atau sejahtera daripada sebelumnya². Kesejahteraan dalam konteks ini sekiranya dapat dimaknai berdayanya masyarakat secara merata dalam memenuhi, terutama kebutuhan dasar dalam keberlangsungan hidupnya. Mengembangkan masyarakat juga sama halnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat potensial untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan yang nyata dengan altenatif solusi yang tepat sasaran.

Mengutip dan memaknai konsep pembangunan Parsudi Suparlan tersebut betapa pentingnya peran kelembagaan yang berwewenang atau perencana pembangunan dapat sungguh-sungguh menjadi penggerak dan pengorganisir masyarakat. Dalam hal ini seorang penggerak perubahan dalam lingkungan masyarakat sangatlah penting dalam mengkondisikan individu dan dalam skala yang lebih luas mengkoordinasikan sebuah kelompok masyarakat agar menguatkan jiwa-jiwa pemberdayaan dan kemandirian dalam setiap individu yang tergabung didalamnya.

Sudah menjadi hal biasa kita lihat di media-media program-program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan

.

² Bambang Budiono, *Buku Ajar Antropologi Pembangunan*, (PT.Revka Petra Media,Surabaya,2009), hlm 15

Pemerintah cenderung banyak menuai kritik dan saran. Program pembangunan yang menuai kritik dari masyarakat pada umumnya karena pada proses yang tidak berkelanjutan atau dalam jangka panjang program hanya sia-sia. Secara kasat mata program yang hanya berupa bantuan dari pemerintah tidak dapat dinikmati secara berlanjut dan selalu mangkrak. Seperti contoh kecil program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebenarnya mempunyai tujuan yang baik untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat walaupun hanya sesaat. Banyak bantuan-bantuan secara fisik yang berusaha disalurkan pemerintah untuk mendukung pengembangan masyarakat yang terkadang banyak proses transparansinya kurang meyakinkan masyarakat sehingga sangat wajar masyarakat mengkritik.

Kritik pembangunan atas tidak berlanjutan program bantuan pemerintah karena perencanaan yang tidak matang banyak ditemukan di masyarakat metropolitan. Tidak bermaksud membedakan dengan masyarakat pedesaan namun pada dasarnya masyarakat harus menerima bahwa pada kenyataannya masyarakat pedesaan dan perkotaan mempunyai budaya yang berbeda. Pada masyarakat pedesaan teknik pemberdayaan masyarakatnya jelas mempunyai perbedaan karena budaya yang terbentuk dari masing-masing lingkungan berbeda sejak dari awal. Pada masyarakat pedesaan kegiatan pemberdayaan lewat potensi lingkungan atau alam mempunyai peluang keefektifan yang lebih baik dari pada jika diterapkan pada perkotaan. Begitupun selanjutnya pemberdayaan masyarakat lewat

potensi bantuan keuangan juga tidak akan efektif jika tidak cocok dengan lingkungan alam masyarakat pedesaan.

Masyarakat baiknya tidak pesimis yang berlebihan menanggapi anggapan dan hasil sebuah program yang secara kasat mata gagal. Sebagai masyarakat yang besar, kita sebagai warga negara Indonesia perlu menyadari bahwa proses bantuan pemerintah dari hasil anggaran negara secara ekonomi memang tidak bisa langsung satu kali proses menyelesaikan semua permasalahan namun butuh proses selanjutnya dari kita sasaran program. Bukan bermaksud membela ketidakefektiifan namun pemikiran positif harus dimmunculkan agar kita bergerak lebih aktif dan rasional lagi dalam melihat ketidakefektifan program pembangunan dari pemerintah. Karena pada dasarnya potensi itu bisa muncul dengan kekuatan bermasyarakat yang harmonis. Hal inilah yang menjadi penguat bahwa tepat sekali memilih pendampingan masyarakat untuk perubahan di masyarakat berbasis kepada aset.

Salah satu upaya mandiri yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah dengan membuka atau mengembangkan usaha ekonomi produktif bagi penduduk miskin dalam skala mikro dan kecil. Namun bila dicermati secara lebih mendalam, ternyata usaha kecil yang kadang dianggap remeh justru usaha tersebut dapat bertahan dan bahkan semakin berkembang. Melihat fenomena ini kiranya perlu usaha-usaha untuk mendukung daya pertumbuhannya. Pengidentifikasian masalah

yang terjadi pada sector usaha kecil perlu dilakukan pemantauan terusmenerus agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing.

Sektor usaha ekonomi produktif dalam skala kecil merupakan sektor yang dinilai menguntungkan dan diperkirakan mampu "menjaga" ekonomi rumah tangga dalam keterpurukan. Memasuki usaha ekonomi produktif dalam skala kecil membutuhkan persyaratan dan ketrampilan yang tidak terlampau sulit. Sektor ini juga memungkinkan mobilitas atau pengendalian potensi sumberdaya setempat.

Sebelum tahun 2013 di kampung Mojoklanggru Lor tidak terlihat adanya kelompok sosial masyarakat yang aktif, namun setelah Ketua RW berinisiatif mengundang tokoh agama untuk mengkoordinasikan jamaah pengajian perempuan untuk ikut pelatihan, disinilah pendamping melihat mulai ada aset yang sebenarnya harus dikembangkan. Pada awalnya pelatihan yang diadakan di kantor kecamatan Gubeng sangatlah tidak efektif karena langsung menawarkan pelatihan pembuatan kecap. Dari dudut pandang pendampingan berbasis aset masyarakat Mojoklanggru Lor didampingi untuk tidak melihat hal yang tidak baik itu namun melihat bagaimana apa yang sudah dipunyai yaitu jika pada kondisi di Mojoklanggru Lor adalah terbentuk secara tidak sengaja beberapa perempuan dalam program pembangunan.

Pokmas Sholehah Sejahtera yang digerakkan oleh partisipasi Ibu-Ibu ini awalnya mencoba memproduksi Kecap Cap Jempol. Kegiatan ini adalah hasil sosialisasi KSM atau kelompok Swadaya Masyarakat yang juga di

naungi oleh Badan Pengembangan UKM daerah Surabaya. Pilihan produk yang akan dikembangkan ini dinilai sangat tidak efektif karena itu saat ini produksi kecap tidak berlanjut. Ibu-Ibu berpendapat produksi kecap itu dirasakan sulit karena saat itu Ibu-Ibu banyak yang tidak tertarik karena untuk ukuran KSM baru, produksi kecap itu akan memerlukan usaha yang sangat ekstra, mengingat produk-produk kecap pabrik besar sudah banyak. Apalagi maslah modal juga dirasa sangat kurang dalam mengembangkan kegiatan ini.³

Berhentinya KSM produksi kecap di kalangan Ibu-Ibu di RW 04 KampungMojoklanggru ini akhirnya tidak berlangsung lama, pada tahun 2014 Ibu-Ibu mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Pokmas dengan produksi busana muslim atau Pokmas yang berorientasi pada konveksi. Modal yang didapatkan oleh Ibu-Ibu di kampung ini awalnya adalah mengajukan proposal pada Dinas Sosial. Setelah proposal ini diterima akhirnya Pemerintah mensetujui untuk memberikan dana hibah sebagai modal utama kepada kelompok ini untuk memfasilitasi semua peralatan dalam mengembangkan Pokmas Sholehah Sejahtera di bidang Konveksi.

Saat ini Pokmas Sholehah Sejahtera yang usaha di bidang konveksi busana muslimah dipusatkan di salah satu rumah warga yaitu Ibu Ninik seorang penjahit yang cukup dikenal sejak lama di kampung tersebut. Namun beberapa mesin di rumah Ibu Sri yang juga penjahit. Ibu Ninik dan Ibu Sri adalah juga penjahit yang sudah dikenal dan aktif sebagai tokoh

³ Hasil wawancara Bu Hamzah di acara pertemuan anggota Pokmas di rumah Bu Ninik.

masyarakat terutama dikalangan perempuan warga RW 04 Kampung Mojoklanggru Lor. Oleh karena itu kedua ibu ini yang akan membimbing Ibu-Ibu yang lain yang ingin ikut berpartisipasi. Pada awalnya perempuan Mojoklanggru Lor yang benar-benar selalu aktif menggerakkan kegiatan produksi Konveksi ada Ibu Ninik, Ibu Sri, Ibu Nina, Ibu Evi, Ibu Hamzah, Ibu Yuli. Ibu-Ibu inilah yang saat ini mengatur jalannya produksi konveksi.

Pokmas yang masih berjalan belum lama ini masih pelan-pelan dalam mengembangkan usahanya. Untuk masalah manajemen yang dikelola Ibu-Ibu ini telah mengelolanya dengan perlahan namun pasti. Hasil keuntungan yang diperoleh dari menjual produk konveksi akan dibagi kepada Ibu-Ibu yang aktif tadi. Untuk jumlah hasil keuntungan juga akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing anggota yang aktif. Saat ini pasar dari produksi konveksi masih dalam wilayah individu-individu di lingkungan kampung Mojoklanggru Lor yang menjadi konsumen. Namun saat ini ada setelah mulai ikut paneran-pameran Pokmas mendapat borongan untuk memproduksi seragam bu-Ibu PKK.

Dengan berbagai proses yang dialami masyarakat kampung Mojoklanggru Lor tersebut dalam mencoba menggerakkan kelompok ibu-bu yang produktif di kampung, menjadi fokus penelitian untuk memahaminya. Sebuah komunitas yang mempunyai potensi yang pasti untuk menuju perubahan sangat disayangkan jika kurang mendapat apresiasi masyarakat. Maka dibutuhkan sebuah perencanaan partisipatif untuk menekan angka kemunduran Pokmas ekonomi produktif ini.

Berbagai masalah seperti kurang efektifnya usaha Pokmas dalam menarik partisipasi masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai waktu luang ini dapat diatasi dengan menjembatani jurang kesenjangan antara ibu-ibu dan penggerak Pokmas.⁴ Beberapa cara yang potensial ditempuh guna menjembatani kesenjangan interaksi komunitas penggerak Pokmas dan Ibu-Ibu lainnya. Oleh karena itu

B. Fokus dan Tujuan Pendampingan

Pendampingan ini difokuskan pada peningkatan aksi partisipatif perempuan di kampung Mojoklanggru Lor dalam mengelola kelommpok usaha bersama yang baru dirintis agar cepat . Penyadaran terhadap aset di lingkungan masyarakat Mojoklanggru Lor merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan proses pendampingan berbasis aset sesuai dengan ketentuan metode pendampingan *Asset Based Community Development* atau ABCD.

Proses pendampingan dalam mengenal dan mengelola aset kepada para perempuan di Mojoklanggru Lor, bertujuan agar para perempuan di kampung-kampung kota semacam di Mojoklanggru Lor juga dapat menghasilkan perubahan dalam lingkungannya. Mengingat terbentuk sebagai kelompok masyarakat perkotaan kelompok ini harusnya dapat kuat bersaing dalam meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi daerah dalam mensukseskan pembangunan tepatnya di Kota Surabaya.

⁴ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif,* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014), hlm. 102

_

C. Pihak-Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dengan proses pendampingan antara lain :

1. Ketua RW

Ketua RW mememiliki peran untuk mengkordinasi masyarakat Mojoklanggru Lor terutama para perempuan agar dapat menerima pemahaman akan urgensitas Pokmas yang mulai dirintis.

2. Masyarakat Mojoklanggru Lor

Masyarakat merupakan pihak penting yang mampu mensukseskan suatu pendampingan, karena masyarakat adalah objek maupun subjek dalam suatu pemberdayaan secara mandiri. Dari masyarakat peneliti memperoleh informasi-informasi yang valid yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dari masyarakat sendirilah keberhasilan dan kegagalan pendampingan yang dilakukan secara partisipasi aktif.

3. Pokmas Sholehah Sejahtera

Kelompok masyarakat Sholehah merupakan salah satu perkumpulan ibu rumah tangga yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha konveksi yang masih baru.

D. Rencana Pendampingan

Adanya jadwal ini bisa memudahkan pendamping untuk melakukan kegiatan yang terstruktur dan terjadwal sehingga proses pendampingan akan berjalan tepat waktu dan sesuai keinginan. Berikut merupakan jadwal kegiatan pendampingan yang akan dilakukan.

Tabel 1.1 Rencana pendampingan berbasis ABCD

No.	Kegiatan	Bulan						
		Maret- April	Mei- Juni	Juni- Juli	Ags- Sept	Okt- Nov	Des- Jan	Feb
1	Observasi lapangan	V						
2	Pengurusan perizinan	V						
3	Pembuatan Proposal	V						
4	Proses Pendampingan							
	a. Inkulturasi	V	V	V	V			
	b. Discovery (Wawancara Apresiatif)	1	V	v				
	c. Dream		V					
	d. Design (Merencanakan aksi bersama)			v	V			
	e. Define (Pelaksanakan aksi)			V	V	V		
	f. Monitoring dan Evaluasi						V	V
5	Pelaporan							
	a. Bimbingan Pelaporan	V				V	V	
	b. Ujian Skripsi							V

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab. Adapun sistematika yang telah penulis susun adalah sebagai berikut:

- Bab I membahas tentang latar belakang dari mengapa pendampingan ini dilakukan. Menjelaskan analisis pendukung dari fokus pendampingan.
 Serta gambaran problematika yang ada di kampung Mojoklanggru Lor tentang perkembangan konsdisi Pokmas usaha bersama pada awalnya.
- 2. Bab II membahas landasa teori dan konsep yang menjadi acuan metode pendampingan.
- 3. Bab III membahas tentang profil lokasi dampingan yang meliputi konndisi geografis, demografis, ekonomi warga, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan lingkungan, dan kegiatan keagamaan
- 4. Bab IV membahas tentang proses mewujudkan kekuatan perempuan mojoklanggru lor melalui pendampingan *discovery, dream design* .
- Bab V membahas lebih banyak hasil proses pendampingan mulai proses, define, dan destiny.
- 6. Bab VI membahas tentang refleksi atas dampingan yang dilakukan mulai dari proses pra-dampingan, saat dampingan, pasca-dampingan serta simpulan refleksi atas ketiga sub proses tersebut.
- 7. Bab VII membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi kegiatan pendampingan ini.